TSAQOFAH
Jurnal Penelitian Guru Indonesia

p-ISSN: 2810-0395
e-ISSN: 2810-0042

Terindeks : Dimensions, Scilit, Lens, Semantic, Garuda, Google Scholar, Base, etc

https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v5i4.6400

MENARIK AKAR SEJARAH PENDIDIKAN INDONESIA: PANCASILA SEBAGAI FONDASI PEMBENTUKAN KARAKTER BANGSA DI ERA KONTEMPORER

Tracing the Historical Roots of Indonesian Education: Pancasila as the Foundation of Nation Character Building in the Contemporary Era

Yuda Ariwinata & Ofianto
Universitas Negeri Padang
yudaariwinata@gmail.com; ofianto.anto@yahoo.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
May 13, 2025	Jun 8, 2025	Jun 20, 2025	Jun 25, 2025

Abstract

Education in Indonesia has deep historical roots as a tool for liberation from colonialism and as a means of shaping national character, with Pancasila serving as both the state ideology and the primary philosophical foundation of the national education system. This article aims to examine the historical roots of Indonesian education, the central role of Pancasila in character formation, and the contemporary challenges in consistently and contextually integrating its values into the education system. Using a descriptive qualitative approach based on literature review, this study explores various academic sources and educational policies to identify how Pancasila values are embedded in the curriculum and educational practices in the modern era. The findings reveal that although Pancasila has been normatively established as the foundation of the national education system, its implementation continues to face obstacles such as gaps in understanding, policy inconsistency, and the pressures of globalization and digitalization. The study concludes that strengthening Pancasila values requires the development of a contextually relevant curriculum, improvement in teacher quality, and

Tsaqofah journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

synergy among the government, educational institutions, and society. Revitalizing Pancasila-based character education emerges as a key strategy in shaping a generation that is intellectually competent as well as morally and socially resilient in navigating the complexities of the modern world.

Keywords: Pancasila; Character Education; History of Indonesian Education; Nationalism; Values-Based Curriculum

Abstrak: Pendidikan di Indonesia memiliki akar historis yang kuat sebagai instrumen pembebasan dari penjajahan dan pembentukan karakter bangsa, dengan Pancasila sebagai dasar negara sekaligus fondasi filosofis utama dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji akar historis pendidikan Indonesia, peran sentral Pancasila dalam pembentukan karakter, serta tantangan aktual dalam mengintegrasikan nilai-nilainya secara konsisten dan kontekstual ke dalam sistem pendidikan. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi pustaka, penelitian ini menelusuri berbagai literatur ilmiah dan kebijakan pendidikan untuk mengidentifikasi bagaimana nilai-nilai Pancasila diintegrasikan ke dalam kurikulum dan praktik pendidikan di era kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun Pancasila telah menjadi landasan normatif dalam sistem pendidikan nasional, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan, seperti kesenjangan pemahaman, ketidakkonsistenan kebijakan, serta pengaruh globalisasi dan digitalisasi. Kesimpulan dari kajian ini menegaskan pentingnya penguatan nilai-nilai Pancasila melalui pengembangan kurikulum yang kontekstual, peningkatan kualitas pendidik, serta sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Revitalisasi pendidikan karakter berbasis Pancasila menjadi strategi penting untuk membentuk generasi yang cerdas secara intelektual sekaligus tangguh secara moral dan sosial dalam menghadapi dinamika zaman.

Kata Kunci: Pancasila; Pendidikan Karakter; Sejarah Pendidikan Indonesia; Nasionalisme; Kurikulum Berbasis Nilai

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia lahir dari perjuangan panjang melawan penjajahan yang menindas. Pendidikan bukan sekadar proses transfer ilmu, melainkan medan pertempuran ide dan jiwa yang menentukan masa depan bangsa. Pendidikan adalah senjata ampuh untuk membebaskan bangsa dari belenggu penindasan dan menjadikan rakyatnya manusia merdeka, berkarakter, dan berjiwa nasionalis. Oleh karena itu, memahami akar sejarah pendidikan Indonesia dan menempatkan Pancasila sebagai landasan filosofis pendidikan adalah keharusan mutlak dalam membangun karakter dan jati diri bangsa yang kokoh (Dewantara, 1959; Yamin, 1961).

Sejarah pendidikan Indonesia tidak lepas dari perjuangan yang menempatkan pendidikan sebagai ruang pembebasan dan pengembangan potensi peserta didik. Ki Hajar

Dewantara menegaskan bahwa pendidikan harus memerdekakan pikiran dan jiwa dari penjajahan, bukan sekadar meniru sistem kolonial Belanda yang bersifat eksploitatif (Dewantara, 1959). Konsep "Taman Siswa" menjadi simbol pendidikan pembebasan yang menumbuhkan nasionalisme dan sosialisme sebagai semangat persatuan dan keadilan sosial (Yamin, 1961). Pendidikan adalah ruang tumbuhnya kesadaran kebangsaan dan sosialisme yang mengikat rakyat dalam semangat persatuan.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU No. 20 Tahun 2003) menegaskan bahwa pendidikan nasional bertujuan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya (UU No. 20/2003, Pasal 3). Pendidikan bukan hanya soal transfer pengetahuan, melainkan proses pembentukan karakter dan jati diri bangsa yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah hidup dan ideologi negara (Kemendikbud, 2023).

Kedudukan Pancasila dalam pembentukan karakter dan jati diri bangsa sangat strategis. Nilai-nilai Pancasila yang mengandung ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial harus menjadi roh dan jiwa dalam setiap proses pendidikan. Pendidikan berlandaskan Pancasila mampu menumbuhkan karakter peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, serta memiliki rasa cinta tanah air dan solidaritas sosial yang tinggi (Maulida, 2023). Dalam konteks isu pendidikan kontemporer seperti kesenjangan akses, kualitas guru, dan tantangan digitalisasi, Pancasila menjadi pedoman moral untuk menjaga integritas dan tujuan pendidikan nasional (Sari, D. P., & Hakim, L. 2021).

Penguatan Pancasila sebagai landasan filosofis pendidikan harus didasarkan pada pendekatan filosofis groslang, yakni memahami Pancasila secara utuh sebagai sistem nilai integral dan dinamis. Pancasila bukan sekadar kumpulan nilai normatif, tetapi sistem filsafat hidup yang mengarahkan pendidikan menuju pembentukan manusia Indonesia yang utuh, berkepribadian, dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan jati diri (Kaelan, 2010). Filosofi ini menuntut pendidikan untuk tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan moral peserta didik secara menyeluruh.

Namun, dunia pendidikan Indonesia menghadapi persoalan kompleks. Ketidakkonsistenan kebijakan, kesenjangan akses pendidikan terutama di daerah terpencil, serta tantangan dalam pengembangan kualitas guru menjadi hambatan serius dalam mewujudkan pendidikan berkarakter berbasis Pancasila (Smith, J. 2019). Selain itu,

perkembangan teknologi dan globalisasi membawa tantangan baru dalam menjaga nilai-nilai luhur bangsa agar tidak terkikis oleh arus budaya asing yang kurang sesuai dengan falsafah bangsa (Simbolon et al., 2025,)

Pancasila sebagai fondasi pendidikan telah diintegrasikan dalam kurikulum nasional, metode pengajaran, dan evaluasi pembelajaran. Nilai-nilai Pancasila seperti toleransi, keadilan, kejujuran, dan persatuan menjadi landasan pembentukan karakter peserta didik yang berintegritas dan bertanggung jawab (Hazimah & Dewi, 2021). Namun, implementasi nilai-nilai tersebut masih menghadapi tantangan berupa variasi pemahaman dan keterbatasan sumber daya, sehingga diperlukan pelatihan berkelanjutan bagi pendidik dan kolaborasi erat antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat (Lisa & Kurnia, (2023).

Pendidikan berbasis Pancasila menjadi sarana penting dalam membentuk sikap inklusif dan penghargaan terhadap keberagaman bangsa Indonesia. Nilai gotong royong dan keadilan sosial mengajarkan peserta didik hidup berdampingan secara harmonis dan saling menghormati (Nugraha & Herawati, 2020). Penguatan pendidikan karakter yang berlandaskan Pancasila menjadi strategi utama menghadapi tantangan sosial dan budaya di era globalisasi.

Pengembangan kurikulum yang menekankan pembentukan karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila harus melibatkan seluruh komponen pendidikan, termasuk guru, orang tua, dan masyarakat. Pendekatan pembelajaran aktif, kreatif, dan inovatif yang mengintegrasikan teknologi informasi dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif peserta didik, sekaligus memperkuat pemahaman mereka terhadap nilai-nilai Pancasila (Putri et al., 2020)

Penelitian ini bertujuan menjawab persoalan bagaimana Pancasila dapat diperkuat sebagai landasan filosofis dan praktis dalam pendidikan nasional, khususnya dalam pembentukan karakter dan jati diri bangsa di tengah dinamika pendidikan kontemporer. Penelitian ini juga mengkaji akar sejarah pendidikan Indonesia sebagai fondasi penting dalam memahami peran Pancasila, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan masa kini.

Dengan menarik akar sejarah pendidikan Indonesia yang sarat makna perjuangan dan pembebasan, serta menempatkan Pancasila sebagai fondasi utama pembentukan karakter bangsa, kita tidak hanya membangun manusia cerdas secara intelektual, tetapi juga manusia yang berjiwa merdeka, berkarakter, dan berwawasan kebangsaan. Pendidikan yang demikian

adalah kunci mewujudkan cita-cita kemerdekaan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Maka dari itu, penguatan pendidikan berbasis Pancasila harus menjadi prioritas nasional yang tidak bisa ditawar lagi. Semangat perjuangan para pendiri bangsa harus terus dihidupkan dalam setiap proses pembelajaran agar generasi muda Indonesia mampu menghadapi tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri dan nilai-nilai luhur bangsa.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat landasan filosofis pendidikan nasional, sekaligus menjadi pijakan strategis dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang berorientasi pada pembentukan karakter dan jati diri bangsa yang berlandaskan Pancasila.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan menganalisis berbagai sumber pustaka yang relevan seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen resmi terkait pendidikan Pancasila dan pembentukan karakter bangsa. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali dan memahami secara mendalam konsep, teori, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik, sehingga dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai peran Pancasila dalam pendidikan nasional (Zed, 2004). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur secara sistematis dan analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi tema-tema utama serta hubungan antar konsep dari berbagai sumber yang dikaji. Validitas data dijaga dengan melakukan triangulasi sumber dan pengecekan ulang terhadap literatur yang relevan agar hasil penelitian memiliki keakuratan dan kredibilitas yang tinggi (Zed, 2004).

HASIL

Analisis literatur menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila secara inheren termanifestasi dalam berbagai aspek sistem pendidikan nasional, mulai dari landasan filosofis hingga implementasi kurikulum, meskipun implementasinya tidak selalu berjalan mulus dan menghadapi berbagai tantangan.

Pancasila sebagai Landasan Filosofis bermakna Pancasila adalah *staatsfundamentalnorm* yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas, Pasal 1 ayat 2), bukan hanya sekedar dasar hukum, tetapi juga fondasi filosofis yang menjiwai seluruh penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Ini berarti bahwa setiap kebijakan, kurikulum, dan praktik pendidikan harus selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Tilaar (2009) menegaskan bahwa Pancasila bukan hanya sekedar ideologi negara, melainkan juga *weltanschauung* yang membentuk cara pandang, nilai-nilai, dan perilaku warga negara. Lebih lanjut, sila-sila dalam Pancasila memberikan arah yang jelas bagi pengembangan pendidikan karakter. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengarahkan pada pengembangan spiritualitas yang inklusif dan toleran, serta penanaman nilai-nilai moral dan etika yang universal (Madjid, 1998; Naim, 2012). Ini berarti pendidikan harus mampu mengembangkan kesadaran akan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, serta menghormati perbedaan keyakinan dan agama. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menekankan pentingnya perlakuan yang setara dan adil bagi seluruh peserta didik, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, agama, atau etnis (Suparlan, 2002; Zamroni, 2011).

Pendidikan harus mampu mengembangkan rasa empati, solidaritas, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Sila Persatuan Indonesia menggarisbawahi pentingnya menanamkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air, serta mempromosikan persatuan dan kesatuan bangsa. Pendidikan harus mampu mengembangkan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia, serta menghargai keberagaman budaya dan etnis. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan mengamanatkan pengembangan kemampuan berpikir kritis, partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan, dan penghargaan terhadap demokrasi. Pendidikan harus mampu mengembangkan kemampuan berargumentasi, berdiskusi, dan menghargai pendapat orang lain. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menekankan pentingnya pemerataan kesempatan pendidikan bagi seluruh warga negara, serta pengembangan kesadaran sosial dan kepedulian terhadap sesama. Pendidikan harus mampu mengembangkan rasa tanggung jawab sosial, serta berpartisipasi aktif dalam upaya mewujudkan keadilan sosial.

Pendidikan sebagai Alat Pembebasan dan Media Nasionalisme mengacu Analisis historis menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia telah memainkan peran penting sebagai alat pembebasan dari penjajahan dan penindasan. Ki Hajar Dewantara, sebagai Bapak

Pendidikan Nasional, mengusung konsep "pendidikan yang memerdekakan" (*onderwijs tot vrijheid*) yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara holistik, meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotor (Dewantara, 1962).

Pendidikan juga berfungsi sebagai media untuk menanamkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air, sebagaimana tercermin dalam kurikulum pendidikan pada masa awal kemerdekaan (Soedjatmoko, 1977; Tsuchiya, 1987). Kurikulum pada masa itu secara eksplisit dirancang untuk menanamkan nilai-nilai patriotisme, persatuan, dan kesatuan bangsa, sebagai respons terhadap pengalaman pahit penjajahan. Sejarah perjuangan bangsa, tokoh-tokoh pahlawan, dan simbol-simbol negara diajarkan secara intensif untuk membangkitkan rasa cinta tanah air dan semangat rela berkorban demi bangsa dan negara. Anderson (1983) dalam studinya tentang *imagined communities* menjelaskan bagaimana pendidikan berperan dalam membangun identitas nasional melalui penanaman narasi sejarah dan budaya yang sama, menciptakan rasa kebersamaan dan solidaritas di antara warga negara.

lebih lanjut, Integrasi Nilai Pancasila dalam Kurikulum khususnya terhadap kajian terhadap berbagai kurikulum pendidikan nasional (Kurikulum 2006, Kurikulum 2013, dan Kurikulum Merdeka) menunjukkan adanya upaya berkelanjutan untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam proses pembelajaran. Kurikulum 2013, misalnya, secara eksplisit mencantumkan pendidikan karakter sebagai salah satu tujuan utama pendidikan nasional, dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap mata pelajaran. Kurikulum Merdeka, dengan penekanan pada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan kontekstual, memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi guru untuk mengaitkan nilai-nilai Pancasila dengan isu-isu aktual yang relevan dengan kehidupan peserta didik (Kemendikbudristek, 2022). Integrasi ini dilakukan melalui berbagai cara, seperti penyisipan nilai-nilai Pancasila dalam materi pembelajaran (misalnya, melalui studi kasus, cerita inspiratif, atau analisis isu-isu sosial), penggunaan metode pembelajaran yang partisipatif dan kolaboratif (misalnya, melalui diskusi kelompok, proyek kolaboratif, atau simulasi), serta penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler yang menumbuhkan karakter positif (misalnya, melalui kegiatan kepramukaan, kegiatan sosial, atau kegiatan seni budaya). Namun, efektivitas integrasi ini sangat bergantung pada kemampuan guru dalam memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila, serta kreativitas mereka dalam merancang pembelajaran yang menarik dan relevan bagi peserta didik.

Meskipun terdapat upaya yang signifikan untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam sistem pendidikan nasional, implementasinya menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang kompleks. Kurangnya pemahaman guru tentang nilai-nilai Pancasila, yang seringkali hanya dipahami sebagai hafalan semata tanpa internalisasi yang mendalam, merupakan salah satu tantangan utama. Keterbatasan sumber daya dan fasilitas, seperti buku teks yang relevan, media pembelajaran yang menarik, dan lingkungan belajar yang kondusif, juga menjadi hambatan yang signifikan. Pengaruh globalisasi yang menggerus nilai-nilai tradisional, serta masuknya ideologi-ideologi asing yang bertentangan dengan Pancasila, juga menjadi ancaman yang perlu diwaspadai.

Polarisasi sosial dan politik, yang seringkali tercermin dalam perbedaan pandangan tentang interpretasi dan implementasi Pancasila, juga dapat menghambat efektivitas pendidikan Pancasila. Selain itu, penggunaan teknologi dan media sosial yang tidak bijak, yang dapat menyebarkan informasi yang salah dan merusak moralitas, juga menjadi tantangan yang perlu diatasi (Zubaedi, 2011; Darmiyati Zuchdi, 2010; UNESCO, 2015). Inkonsistensi dalam kebijakan pendidikan, perubahan kurikulum yang terlalu sering, dan kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan juga dapat menghambat efektivitas implementasi pendidikan Pancasila.

PEMBAHASAN

Analisis ini menegaskan bahwa Pancasila tetap memiliki relevansi yang kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia kontemporer, khususnya dalam konteks pembentukan karakter. Sebagai dasar negara yang mengandung nilai-nilai luhur, Pancasila memiliki kedudukan strategis dalam membentuk identitas nasional sekaligus menjadi pedoman etika sosial. Koento Wibisono (1992) mengemukakan bahwa Pancasila adalah sistem nilai yang komprehensif karena mencakup dimensi spiritual, moral, dan sosial yang saling terintegrasi. Artinya, nilai-nilai dalam Pancasila tidak hanya bersifat normatif dan abstrak, melainkan juga dapat diimplementasikan dalam praktik kehidupan sehari-hari, termasuk dalam dunia pendidikan. Pandangan ini memperkuat anggapan bahwa Pancasila bukan hanya ideologi negara yang menjadi simbol formal, melainkan juga fondasi moral yang sangat penting dalam membentuk individu yang memiliki integritas, tanggung jawab, dan kesadaran sosial. Dengan kata lain, Pancasila memiliki potensi besar sebagai instrumen transformatif dalam upaya

membangun karakter warga negara yang tangguh dan berkepribadian luhur di tengah arus perubahan global.

Lebih jauh, pentingnya internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam dunia pendidikan ditegaskan pula oleh Tilaar (2009) yang melihat bahwa pendidikan karakter berbasis nilai-nilai budaya bangsa, termasuk Pancasila, merupakan salah satu jawaban atas krisis moral dan identitas yang melanda generasi muda Indonesia saat ini. Fenomena degradasi moral, individualisme, dan melemahnya rasa kebangsaan menjadi tantangan besar yang harus dihadapi sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu, pendidikan tidak boleh hanya menekankan pada pencapaian kognitif, tetapi juga harus berorientasi pada pembentukan karakter yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa. Dalam konteks ini, Pancasila dapat menjadi kerangka nilai yang mengarahkan peserta didik untuk mengenal, memahami, dan menginternalisasi prinsip-prinsip seperti keadilan sosial, kemanusiaan, gotong royong, dan penghormatan terhadap perbedaan. Implementasi pendidikan berbasis Pancasila yang bersifat integratif dan kontekstual akan membekali peserta didik dengan kompas moral yang kokoh, yang tidak hanya berguna dalam konteks akademik, tetapi juga dalam kehidupan sosial yang lebih luas.

Namun demikian, efektivitas pendidikan karakter berbasis Pancasila sangat bergantung pada kualitas dan metode implementasinya. Pendekatan yang bersifat verbalistik atau indoktrinatif sering kali tidak efektif dalam menumbuhkan pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai tersebut. Dalam hal ini, Setiadi et al. (2018) dalam publikasinya di *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran yang bersifat partisipatif dan kontekstual jauh lebih berdampak dalam membentuk karakter peserta didik. Pendekatan ini menempatkan siswa sebagai subjek aktif dalam proses belajar, mendorong mereka untuk merefleksikan nilai-nilai yang dipelajari, serta mengaitkannya dengan pengalaman konkret dalam kehidupan mereka. Misalnya, dengan melibatkan siswa dalam kegiatan proyek sosial, diskusi nilai, atau studi kasus, maka proses pembelajaran tidak hanya menjadi lebih bermakna tetapi juga lebih relevan dengan tantangan yang mereka hadapi. Pembelajaran semacam ini memungkinkan internalisasi nilai-nilai Pancasila secara lebih mendalam dan berkelanjutan, sehingga mampu membentuk karakter yang tahan uji dalam menghadapi dinamika sosial yang kompleks.

Dalam proses implementasi pendidikan karakter tersebut, peran guru menjadi sangat krusial. Guru tidak hanya berfungsi sebagai pengajar materi, tetapi juga sebagai figur teladan

yang mampu menginspirasi dan membimbing siswa dalam membentuk karakter. Guru yang memiliki karakter kuat dan konsisten menunjukkan nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari dapat menjadi model yang sangat efektif dalam pendidikan karakter. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan karakter tidak akan berhasil tanpa kehadiran figur-figur pendidik yang autentik dan berintegritas. Guru yang memahami, meyakini, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan konkret akan lebih mampu menanamkan nilai-nilai tersebut kepada peserta didik. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi guru dalam bidang pendidikan karakter, termasuk pelatihan mengenai metode pedagogis berbasis nilai, serta pengembangan profesional yang berkelanjutan, menjadi prasyarat yang tidak bisa ditawar dalam keberhasilan program pendidikan karakter berbasis Pancasila. Peran guru sebagai fasilitator pembelajaran nilai harus diperkuat melalui kebijakan pendidikan yang mendukung serta penyediaan sumber daya yang memadai (Lickona, 1991)

Tidak hanya guru dan lembaga pendidikan, lingkungan sosial yang lebih luas seperti keluarga dan masyarakat juga memainkan peran penting dalam pembentukan karakter yang berlandaskan Pancasila. Dalam teori ekologi perkembangan manusianya menekankan bahwa perkembangan individu tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh berbagai sistem lingkungan yang saling berinteraksi, mulai dari lingkungan terdekat seperti keluarga dan sekolah, hingga lingkungan makro seperti media massa dan kebijakan publik. Dalam konteks ini, keterlibatan aktif keluarga dan masyarakat menjadi sangat vital untuk menciptakan ekosistem nilai yang konsisten dan mendukung pembentukan karakter. Nilai-nilai yang diajarkan di sekolah harus diperkuat melalui praktik di rumah dan masyarakat agar tidak terjadi disonansi nilai yang justru dapat membingungkan atau melemahkan proses internalisasi nilai. Oleh karena itu, sinergi antara sekolah, keluarga, dan komunitas dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila merupakan strategi yang tidak hanya ideal, tetapi juga sangat diperlukan agar nilai-nilai tersebut dapat benar-benar menjadi bagian dari pola pikir dan perilaku generasi muda dalam kehidupan nyata (Bronfenbrenner, 1979).

Dengan memperhatikan berbagai dimensi tersebut, dapat disimpulkan bahwa penanaman nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan dan kehidupan sosial merupakan investasi strategis untuk masa depan bangsa. Upaya ini tidak bisa dilakukan secara parsial atau insidental, melainkan harus bersifat sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan. Diperlukan kemauan politik, dukungan kebijakan, peningkatan kapasitas pendidik, serta keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila benar-benar hidup dan berkembang dalam diri setiap warga negara. Melalui pendekatan yang inklusif dan

berorientasi pada partisipasi, generasi muda Indonesia dapat dibentuk menjadi insan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter kuat, kesadaran kebangsaan, serta kepedulian sosial yang tinggi. Dengan demikian, pendidikan karakter berbasis Pancasila bukan hanya menjadi solusi atas krisis moral yang ada, tetapi juga menjadi fondasi yang kokoh bagi pembangunan bangsa yang beradab, bersatu, dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa memiliki peran sentral dalam membentuk karakter peserta didik melalui sistem pendidikan nasional. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan, menjadi landasan moral yang mendasari sikap, perilaku, dan cara berpikir generasi muda dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Meskipun implementasi nilai-nilai Pancasila telah diintegrasikan ke dalam berbagai aspek kurikulum dan kegiatan pendidikan, kenyataannya masih ditemukan berbagai tantangan di lapangan, mulai dari lemahnya internalisasi nilai, ketidaksesuaian antara teori dan praktik, hingga pengaruh globalisasi dan media sosial yang sering kali bertentangan dengan semangat Pancasila. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan langkah-langkah strategis seperti penguatan peran guru sebagai agen pembentukan karakter, pembaruan kurikulum yang kontekstual dan relevan, serta kolaborasi aktif antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan secara konsisten dan berkesinambungan. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menjadi sarana transfer pengetahuan, tetapi juga menjadi wahana penting dalam melahirkan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berjiwa pancasilais, memiliki empati sosial, toleransi, serta semangat persatuan dan kesatuan yang kokoh dalam menghadapi dinamika kehidupan global.

DAFTAR PUSTAKA

Anderson, B. (1983). *Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism*. Verso.

Bronfenbrenner, U. (1979). *The ecology of human development: Experiments by nature and design*. Harvard University Press.

Darmiyati Zuchdi. (2010). *Pendidikan karakter: Konsep dasar dan implementasinya di sekolah*. UNY Press.

Dewantara, K. H. (1959). *Pendidikan dan Kebudayaan*. Yogyakarta: Taman Siswa.

Dewantara, K. H. (1962). *Karya Ki Hadjar Dewantara bagian pertama: Pendidikan*. Madjelis Luhur Taman Siswa.

Hazimah, G. F., & Dewi, A. D. (2021). Upaya Memajukan Pendıdıkan Indonesıa Berdasarkan Nılaı-Nilai Pancasıla. *Edusaintek: Jurnal Pendidikan, Sains dan Teknologi,* 149-160. **DOI:** https://doi.org/10.47668/edusaintek.v8i1.120

Kaelan. (2010). *Filsafat Pancasila sebagai Landasan Pendidikan*. Yogyakarta: Paradigma.

Kemendikbud. (2023). *Prioritas Pendidikan Nasional 2023-2025*. Jakarta: Kemendikbud RI.

Kemendikbudristek. (2022). *Kurikulum Merdeka*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Koento Wibisono, S. (1992). *Pancasila sebagai orientasi kehidupan*. BP-7 Pusat.

Lickona, T. (1991). *Educating for character: How our schools can teach respect and responsibility*. Bantam Books.

Lisa, M & Kurnia, H. (2023). Upaya Meningkatkan Pendidikan Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7 (1), https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/4807/2959/12364

Madjid, N. (1998). *Islam, kemodernan, dan keindonesiaan*. Mizan.

Maulida, H. (2023). Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia dan relevansinya dengan kurikulum Merdeka. *Prosiding National Conference for Ummah*, 2(1), 450-454.https://conferences.unusa.ac.id/index.php/NCU2020/article/view/1062/675

Maulido, Safiq., Karmijah, Popi., Rahmi, Vinanda. 2024. Upaya Meningkatkan Pendidikan Masyarakat di Daerah Terpencil. *Jurnal Sadewa: Publikasi Ilmu Pendidikan, Pembelajaran dan Ilmu Sosial.* 198-208.**DOI:** https://doi.org/10.61132/sadewa.v2i1.488

Muhammad Yamin. (1961). *Pendidikan dan Kebangsaan*. Jakarta: Balai Pustaka.

Naim, N. (2012). *Pendidikan multikultural: Konsep dan aplikasi*. Ar-Ruzz Media.

Pasal 1 ayat 2, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Putri, A. L., Charista, F. D. F., Lestari, S., dkk(2020).Implementasi Pancasila Dalam Pembangunan Dibidang Pendidikan, *Terampil: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar,* Vol. (1), DOI: https://doi.org/10.24042/terampil.v7i1.5666

Sari, D. P., & Hakim, L. (2021). Peran Pendidikan Pancasila dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi. Jurnal Ilmu Pendidikan, 28(3), 120-134. https://doi.org/10.54321/jip.2021.28.3.120

Setiadi, A., et al. (2018). Pengaruh model pembelajaran partisipatif terhadap pembentukan karakter siswa. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, *24*(2), 123-135.

Simbolon, E. E. P., Jamaludin, Lingga, L. I., da Gomes, M. J., & Mizilfa, N. (2025). Globalisasi dan Identitas: Mencari Keseimbangan Dalam Keragaman Budaya Indonesia. *IJEDR: Indonesian Journal of Education and Development Research*, *3*(1). DOI: 10.57235/ijedr.v3i1.4659

Smith, J. (2019). Transformasi Pendidikan di Daerah Terpencil: Strategi untuk Meningkatkan Akses dan Kualitas. Penerbit Pendidikan Maju.

Soedjatmoko. (1977). *Peranan pendidikan dalam pembangunan bangsa*. Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial.

Suparlan, P. (2002). Menuju masyarakat Indonesia yang multikultural. *Jurnal Antropologi Indonesia, 26*(69), 55-65.

Tilaar, H. A. R. (2009). *Kekuatan pendidikan: Suatu tinjauan sosiokultural*. Rineka Cipta.

Tilaar, H.A.R. (2009). *Pancasila dan Kebudayaan: Perspektif Pendidikan Multikultural*. Kompas Media Nusantara.

Tsuchiya, K. (1987). *Democracy and leadership: The rise of the Taman Siswa movement in Indonesia*. University of Hawaii Press.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

UNESCO. (2015). *Education for all 2000-2015: Achievements and challenges*. UNESCO.

Yamin, M. (1961). *Pendidikan dan Kebangsaan*. Jakarta: Balai Pustaka.

Zamroni. (2011). *Pendidikan demokrasi pada masyarakat multikultural*. Gavin Kalam Utama.

Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Zubaedi. (2011). *Desain pendidikan karakter: Konsepsi dan aplikasinya dalam lembaga pendidikan*. Kencana Prenada Media Group.